

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA PALEMBANG

Oleh :
M. Anwar Saddat
Didik Susetyo
M. Syirod Saleh

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of electric usage cost, income per capita and kWh of road lamp to the road lamp tax in Palembang. Theoritichal approach based on this research is Cobb-Douglas Functions.

This research is supposed to be an information that explain the effect of electric usage cost, income per capita and kWh of road lamp. The data that is used in this research is secondary data taken from many sources, some of them are Badan Pusat Statistik, Dinas Pendapatan Daerah Palembang, PT PLN (Persero) district S2JB Palembang.

The analysis of this research is by using the double linear regression model. The result shows that R Square value is 0,974. It mean that 97,4 persen of road lamp tax effected by electric usage cost, income per capita and kWh of road lamp. From t test can be concluded that electric usage cost and kWh of road lamp are significant to road lamp tax, whereas income per capita is not significant because characteristic of tax that can be pressed.

Keyword : Road lamp tax ,electric usage cost, income per capita and kWh of road lamp.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001. Sejak saat itu wacana otonomi daerah mengemuka dengan berbagai fenomena baru yang perlu pula memperoleh solusi baru, yang sejalan dengan perkembangan politik dalam era reformasi. Hal tersebut sekaligus sebagai pelaksanaan terhadap UUD 45 yang di dalamnya disebutkan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah daerah sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah yang tertuang dalam kewenangan daerah. Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan daerahnya. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam melakukan kegiatannya, pemerintah daerah memerlukan dana demi melaksanakan Pembangunan daerah yang nantinya akan dituangkan dalam APBD Kabupaten/Kota. Untuk itulah diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sesuai untuk membangun suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Sumber-sumber Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah; Dana perimbangan; Pinjaman daerah dan Lain-lain penerimaan yang sah;

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari Hasil pajak daerah; Hasil retribusi daerah; Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu dari penerimaan daerah adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yang besarnya juga telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang mulai diberlakukan pada awal tahun 2001.

Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pembagian jenis-jenis pajak telah mengalami perubahan dan disempurnakan lagi menjadi : (1). Jenis pajak Propinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Pengambilan dan Pemanfatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan (2). Jenis pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan Pajak Parkir.

Dari dua jenis pajak daerah yang telah disebutkan sebelumnya yaitu pajak propinsi dan pajak Kabupaten/Kota, maka penulisan ini akan membahas mengenai pajak Kabupaten/Kota khususnya Pajak Penerangan Jalan yang berada di daerah Kota Palembang. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik yang dimaksud tersebut ditetapkan sebagai berikut: (1). Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kWh yang ditetapkan dalam rekening listrik; dan (2). Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia.

penggunaan listrik atau taksiran penggunaan dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. (Prakosa, 2003 : 123).

Penerangan jalan merupakan penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah melalui pemotongan pajak penerangan jalan. Dalam hal tenaga listrik yang disediakan oleh PLN, maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN, sedangkan pajak penerangan jalan yang tenaga listriknya bukan berasal dari PLN, maka pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Khusus untuk pajak penerangan jalan yang tenaga listriknya bukan berasal dari PLN baru diberlakukan pada tahun 1998.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Sejauh mana biaya pemakaian listrik, pendapatan per kapita penduduk dan jumlah kilowatt-hours (kWh) lampu penerangan jalan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palembang.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana biaya pemakaian listrik, pendapatan per kapita penduduk dan jumlah kWh (nilai penggunaan listrik) lampu penerangan jalan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palembang.

TINJUAN PUSTAKA

Di dalam pemungutan pajak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengindahkan azas-azas dalam sistem perpajakan tersebut. Adam Smith mengatakan setidaknya ada empat aturan dalam suatu sistem perpajakan yaitu: (1). Azas keadilan (*Ability to pay*), artinya beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dasar di dalam distribusi dari setiap tingkatan penghasilan harus dijadikan dasar dalam pemungutan pajak tetapi beban riil dalam arti kepuasan hilang; (2). Azas Kepastian (*Certainly*, artinya pajak hendaknya jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintahan; (3). Azas Kecocokan (*Convenience*), artinya pajak jangan sampai terlalu menekan si wajib pajak sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan pembayaran dengan pemerintah; dan (4). Azas Penghematan (*Economic*, yaitu pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya. (Prakosa, 2003:4)

Dasar hukum dari pemungutan pajak penerangan jalan adalah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan dalam Kota Palembang yang telah disampaikan pada latar belakang penelitian ini.

Berdasarkan cara pemungutannya, Menurut Mardiasmo (2001: 10), tarif pajak dibedakan menjadi empat jenis tarif, yaitu : (1). Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga pajak besarnya pajak yang terhutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak; (2). Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terhutang besarnya tetap; (3). Tarif Progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang

dikenai pajak semakin besar; dan (4). Tarif Degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

METODE PENELITIAN

Tulisan terbatas pada ruang lingkup daerah Kota Palembang yaitu mengenai pajak penerangan jalan dan biaya pemakaian listrik, pendapatan per kapita dan jumlah kWh lampu penerangan jalan yang mempengaruhinya.

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Selatan, PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Cabang Palembang. Data time series yang digunakan hanya dibatasi dari tahun anggaran 1992/1993 sampai tahun 2002.

Batasan-batasan variabel yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Pajak penerang jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
2. Biaya pemakaian listrik adalah jumlah biaya yang harus dibayar pelanggan listrik terhadap nilai jual oleh pengguna tenaga listrik yang dihitung dari kWh dikali tarif per kWh dan ditambah biaya beban yang ditetapkan dalam rekening listrik
3. KWh lampu penerangan Jalan adalah nilai penggunaan tenaga listrik lampu penerangan jalan yang rekeningnya dibayar pemerintah daerah.
4. Pendapatan per kapita adalah biaya rata-rata yang telah dikeluarkan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan baik berupa barang maupun uang.

Dalam membahas permasalahan, penulis menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif, yaitu suatu fungsi regresi linier berganda model Cobb Douglas (Supranto, 1984 :85). Fungsi yang ada deskripsinya tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = f (X_1, X_2, X_3)$$

Fungsi matematis tersebut ditambahkan ke dalam fungsi ekonometrika untuk mengetahui adanya hubungan yang mempengaruhi antar variabel, yaitu regresi linier berganda dengan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \mu_1$$

Keterangan :

Y = Pajak Penerangan Jalan

X₁ = Jumlah Pemakaian Listrik

X₂ = Pendapatan Per Kapita Penduduk Kota Palembang

X₃ = KWh Lampu Penerangan Jalan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode regresi linier berganda antara jumlah pemakaian listrik, pendapatan per kapita penduduk kota Palembang dan kWh lampu penerangan jalan di Kota Palembang diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Y &= -4,36E^{+08} + 5,173^{+02} X_1 + 1336,922 X_2 - 535,727 X_3 \\ t \text{ hitung} &= \quad \quad \quad (7,242) \quad \quad (0,649) \quad \quad (-2,628) \\ R \text{ Adjusted} &= 0,974 ; R = 0,991 ; F \text{ Hitung} = 111,927 \end{aligned}$$

ket : Y = Penerimaan pajak penerangan jalan
X₁ = Jumlah Biaya Pemakaian Listrik
X₂ = Pendapatan Per kapita Penduduk Kota Palembang

Untuk menganalisis pengaruh jumlah pemakaian listrik, pendapatan per kapita penduduk dan kWh lampu penerangan jalan di Kota Palembang, maka di dalam penelitian ini pengujian statistik dilakukan secara parsial dan simultan. Pengujian secara parsial menggunakan uji t, dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen atau α sebesar 5 persen maka $\alpha/2 = 0,025$ dan dengan menggunakan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebesar $n-4$ yaitu $10 - 4 = 6$ maka t tabel ($0,025 : 6$) = 2,447.

Uji t menggunakan kriteria sebagai berikut :

- Ho diterima bila $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, Ha ditolak
- Ho ditolak bila $-t \text{ tabel} > t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, Ha diterima

Selanjutnya untuk pengujian secara simultan digunakan uji F. Nilai dari uji F dibandingkan dengan nilai F tabel dengan level signifikan 5 persen nilai F tabel diperoleh sebesar 4,76 Pengujian uji F menggunakan kriteria sebagai berikut :

- Ho diterima bila $F \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, Ha ditolak
- Ho ditolak bila $F \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, Ha diterima

Sebelum pengujian statistik dilakukan, akan dilakukan pengujian ekonometrika (asumsi klasik) melalui uji multikolinearitas, heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

Uji Gejala Multikolinearitas

Pengujian gejala multikolinearitas dilakukan dengan *Frisch's confluence Analysis* atau *Bunch Map Analisis*. Gejala-gejala yang dipakai untuk menandai adanya multikolinearitas adalah : (a). Koefisien determinasi (R^2); (b). koefisien parsial (R) dan (c). Kesalahan baku dari parameter-parameter regresi (Sumodiningrat, 1993 : 287), secara sendiri-sendiri. Tidak satu pun dari gejala-gejala itu dapat dipakai sebagai indikator yang memuaskan mengenai adanya multikolinearitas karena

1. Kesalahan baku yang besar bisa terjadi karena berbagai sebab, dan tidak hanya karena hubungan-hubungan linier diantara variabel-variabel bebas.
2. Koefisien korelasi parsial yang tinggi hanyalah suatu syarat yang cukup (*sufficient condition*) tetapi bukan syarat yang perlu (*necessary condition*) atau bukan kriteria yang tepat bagi adanya multikolinearitas.
3. Koefisien determinasi (R^2) mungkin saja tinggi mungkin tidak signifikan.

Kombinasi dari ketiga kriteria di atas akan membantu dalam mendeteksi adanya multikolinearitas sebagaimana disarankan oleh Frisch. Regresi bertahap (*Stepwise Regression*). Salah satu dari pengujian Frisch. Dalam memutuskan variabel bebas yang "terbaik".

Dalam analisis ini pengujian terhadap gejala multikolinearitas dilakukan dengan melihat koefisien determinasi parsial (R) dari hasil regresi antara variabel bebas pada model penelitian dan membandingkan dengan koefisien determinasi (R^2) model awalnya.

Apabila nilai R^2 lebih besar atau sama dengan nilai R^2 model awal, maka tingkat multikolinearitas yang terjadi cukup tinggi sehingga membahayakan interpretasi hasil regresi. Selanjutnya apabila nilai R^2 lebih kecil dari R^2 model awalnya, maka tingkat multikolinearitasnya cukup kecil sehingga tidak membahayakan bagi interpretasi hasil regresi tersebut. Model persamaan regresi logaritma natural untuk pengaruh biaya pemakaian listrik, pendapatan per kapita dan kWh lampu penerangan jalan:

$$\begin{aligned}
 Y &= -436.000.000 + 0,05173 X_1 + 1336,992 X_2 - 553,727 X_3 \\
 SE &= (0,007) \quad (2058,663) \quad (203,849) \\
 T \text{ hitung} &= (7,242) \quad (0,649) \quad (-2,628) \\
 R &= 0,991; R^2 = 0,982; R \text{ Adjusted} = 0,974; F \text{ hitung} = 111,927
 \end{aligned}$$

Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, tingkat signifikan 5 persen dengan uji dua arah serta derajat kebebasan (degree of freedom) yang diambil sebesar $n-k$, yaitu $10 - 4 = 6$, maka hasil pengujian multikolinearitas dari persamaan adalah

Untuk X_1 sebagai variabel terikat $R^2 = 0,927$. Dari hasil regresi di atas terlihat bahwa $R^2 X_1$ ternyata jauh lebih kecil dibandingkan R^2 pada estimasi model regresi yang diperoleh.

Untuk X_2 sebagai variabel terikat $R^2 = 0,727$. Dari hasil regresi di atas terlihat bahwa $R^2 X_2$ ternyata jauh lebih kecil dibandingkan R^2 pada estimasi model regresi yang diperoleh.

Untuk X_3 sebagai variabel terikat $R^2 = 0,932$. Dari hasil regresi di atas terlihat bahwa R^2 dari X_3 ternyata jauh lebih kecil dibandingkan R^2 pada estimasi model regresi yang diperoleh. Kesimpulan akhir adalah estimasi model tersebut bebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Gejala Heteroskedastisitas

Munculnya gejala heteroskedastisitas pada model penelitian menyebabkan hasil pengujian hipotesis selalu tidak signifikan. Pengujian gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan "uji Park". Uji park menggunakan $\log e^2$ (residual) sebagai variabel terikat dan variabel bebasnya adalah biaya pemakaian listrik, pendapatan per kapita, kWh lampu penerangan jalan. Dari hasil estimasi residual dengan variabel bebas, apabila nilai t hitung variabel bebasnya lebih kecil dari t tabel, maka model persamaan regresi tersebut bebas dari gejala heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini nilai residual diperoleh dari persamaan regresi logaritma natural linier sebagai berikut:

$$Y = -436.000.000 + 0,05173 X_1 + 1336,992 X_2 - 553,727 X_3$$

Dari persamaan awal tersebut selanjutnya diperoleh hasil estimasi residual dengan variabel bebas yang dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 LNE &= 0,005354 - 1,619E^{-13} - 3,845E^{-09} + 4,833E^{-09} \\
 t \text{ hitung} &= (0,593) \quad (-0,049) \quad (0,621) \\
 R_2 &= 0,063
 \end{aligned}$$

Hasil pengujian gejala heteroskedastisitas akan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai t hitung	Nilai t tabel	Kesimpulan
X ₁	0,593	2,447	Tidak Signifikan
X ₂	-0,049	2,447	Tidak Signifikan
X ₃	0,621	2,447	Tidak Signifikan

Dari hasil estimasi residual dengan variabel ternyata di dapat semua variabel bebasnya memiliki nilai t hitung lebil kecil dari t tabel, artinya hasil estimasi model persamaan regresi tersebut bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi ialah adanya korelasi antara variabel itu sendiri, pada pengamatan berbeda waktu. Pengujian autokorelasi ini menggunakan uji Durbin-Watson (uji d), karena uji Durbin-Watson merupakan cara yang paling populer dan juga tersedia di dalam program SPSS. Pada model regresi diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,811. Adapun aturan menggunakan uji ini adalah: (Djalal, 2002 : 144) :

1. Bila $d < d_L$, maka tolak H_0 . Berarti ada korelasi positif
2. Bila $d_L < d < d_U$, maka kita dapat mengambil keputusan apa-apa. Artinya tidak ada korelasi positif atau negatif.
3. Bila $d_L < d < 4-d_U$ maka jangan tolak H_0 maupun H_a artinya tidak ada korelasi positif ataupun negatif.
4. Bila $4-d_U < d < 3-d_L$ maka kita tidak dapat mengambil keputusan apa-apa.
5. Bila $d_U > 4-d_L$ maka tolak H_a berarti ada korelasi negatif.

Dari perhitungan secara statistik, maka didapat uji Durbin-Watson yaitu sebesar 1,811. Setelah melihat tabel Durbin -Watson, maka didapat:

$$d_L < d < 4-d_U$$

$$0,525 < 1,811 < 4 - 2,014$$

$$0,525 < 1,811 < 1,986$$

Karena uji Durbin Watson sebesar 1,811, maka terletak di $d_L < d < 4-d_U$, maka jangan tolak H_0 maupun H_a , artinya tidak ada korelasi positif ataupun negatif. Dengan kata lain hasil estimasi model tersebut bebas gejala autokorelasi.

Pengujian Statistik

Di dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilaksanakan secara parsial dan simultan. Pengujian secara parsial menggunakan uji t, dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen atau α sebesar 5 persen maka $\alpha/2 = 0,025$ dan dengan menggunakan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebesar $n - 4$ yaitu $10-4 = 6$ maka t tabel $(0,025: 6) = 2,447$

Uji t menggunakan kriteria sebagai berikut :

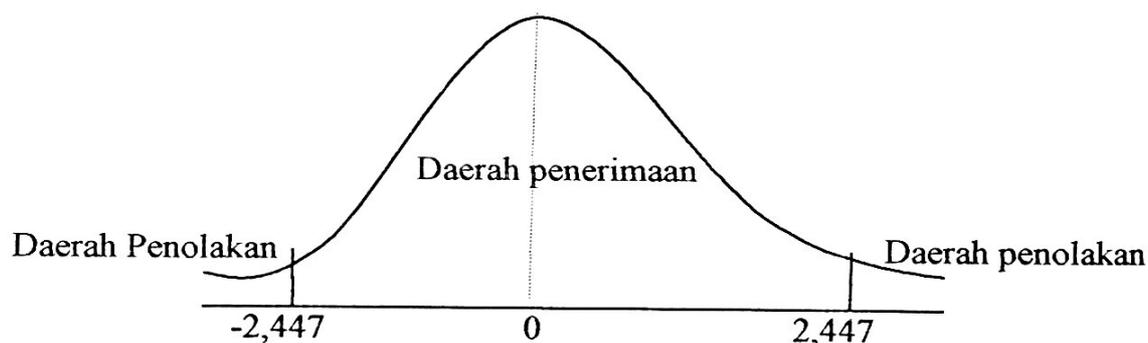
- a. H_0 diterima bila $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, berarti H_a ditolak
- b. H_0 ditolak bila $-t \text{ tabel} > t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, berarti H_a diterima

Tabel 2 dibawah ini menunjukkan signifikan atau tidaknya hasil t hitung dari masing-masing variabel pengaruh.

Tabel 2. Estimasi Regresi Logaritma Natural Linier Dari Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kota Palembang

Variabel	Koefisien Regresi	T hitung
Intersept	-4,36E ⁺⁰⁸	-0,133
Biaya Pemakaian listrik	5,17E ⁻⁰²	7,242
Pendapatan Per kapita	1336,922	0,649
KWh lampu Penerangan Jalan	-535,727	-2,628

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel biaya pemakaian listrik dan kWh lampu penerangan jalan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan. Sementara itu untuk variabel pendapatan per kapita kurang berpengaruh nyata terhadap penerimaan pajak penerangan jalan. Hal ini disebabkan oleh karena sifat pajak yang "dapat dipaksakan" terhadap wajib pajak. Di samping itu listrik yang dalam hal ini disediakan oleh PLN merupakan barang utility yang sangat diperlukan, dilain pihak barang substitusi terhadap listrik tidak ada serta PLN merupakan perusahaan monopoli.



Gambar 1. Uji t Tabel

Selanjutnya untuk pengujian secara simultan digunakan uji F. Nilai dari uji F dibandingkan dengan nilai F tabel dengan level signifikan 5 persen nilai F tabel diperoleh sebesar 4,76 Pengujian uji F menggunakan kriteria sebagai berikut :

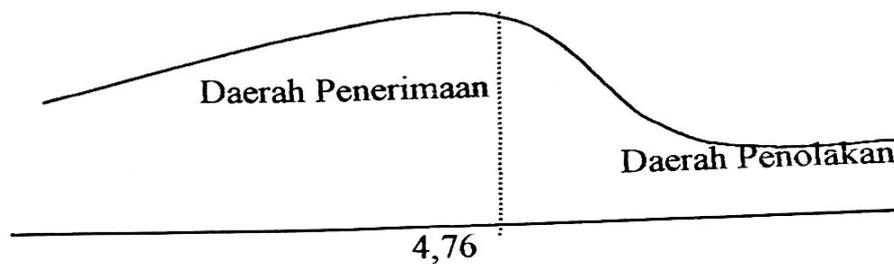
- a. Ho diterima bila $F_{hitung} < t_{tabel}$, H_a ditolak
- b. Ho ditolak bila $F_{hitung} > t_{tabel}$, H_a diterima

Tabel 3 di bawah ini menunjukkan signifikan atau tidaknya hasil F hitung dari variabel-variabel tersebut secara keseluruhan.

Tabel 3. Analisis F Tabel

Df	F	Significant
3		
6	111,927	000
9		

Pada penulisan ini didapat nilai F hitung sebesar 111,97, sedangkan nilai F tabel sebesar 4,76 pada *level of significant* 5 persen. Berarti nilai F hitung lebih besar dari F tabel sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian secara bersama-sama variabel jumlah jumlah biaya pemakaian listrik, kWh lampu penerangan jalan dan pendapatan per kapita terdapat pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palembang.



Gambar 2. Uji-F

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Faktor-faktor biaya pemakaian listrik, pendapatan per kapita dan kWh lampu penerangan jalan secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palembang. Secara parsial hanya pendapatan per kapita yang tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini disebabkan karena listrik merupakan barang utility yang sangat penting, listrik tidak ada barang substitusi, serta sifat pajak yang "dapat dipaksakan".

Berdasarkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,991 menunjukkan terdapat hubungan yang sangat erat antara variabel pajak penerangan jalan dengan variabel biaya pemakaian listrik, pendapatan per kapita dan kWh lampu penerangan jalan.

Koefisien R adjusted sebesar 0,974. Hal ini berarti 97,4 persen kemampuan dari besarnya tingkat biaya pemakaian listrik, pendapatan per kapita penduduk Kota Palembang dan kWh lampu penerangan jalan menjelaskan perubahan tingkat penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palembang. Sementara itu 2,6 persen dipengaruhi faktor-faktor lain di luar model.

Saran-Saran

1. Pemerintah dalam hal ini PLN sebaiknya mengurangi pemadaman listrik bergilir, sehingga pelanggan listrik dapat mengoptimal pemakaian listrik.
2. Pemerintah harus mengamati dan menindak tegas Pelanggan listrik yang "mencuri" kWh listrik, baik itu berupa pencurian kWh maupun yang menggunakan kWh listrik tanpa berlangganan.
3. Perlu adanya sistem meterisasi mengenai penghitungan kWh lampu penerangan jalan yang dilakukan oleh Dinas Kimpraswil Kota Palembang agar ada kecocokan antara PLN dan Pemkot.

4. Perlu adanya upaya menindak tegas pemasangan lampu penerangan jalan secara liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
5. Dilakukan penelitian lanjutan mengenai pajak penerangan jalan bagi yang berminat, terutama berakitan dengan faktor-faktor lain yang belum diteliti.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus SN, Suwondo, Gunadi *Pajak dan Retribusi Daerah*, Modul UT, Karunika, Jakarta, 1986.
- Brotodiharjo R., Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco-Jakarta-Bandung, 1984.
- Davey, K.J. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Jakarta, UI Press, 1988.
- Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) 1993-2002
- Gudjarati, Damodar *Ekonometrika Dasar*, diterjemahkan : Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta, 1988.
- Hidayat, Darwis, 'Prospek dan Kendala Pertumbuhan Bisnis Sektor Riil di Sumatera Selatan' makalah makalah di sampaikan dalam *Forum Diskusi Kebijakan Ekonomi, Fiskal, Moneter, dan Perbankan* diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan Bank Indonesia, Rabu 21 Juli 2004 di Palembang, 2004
- Kesit BP, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press Yogyakarta, 2003
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2001, Penerbit Andi Yogyakarta, 2001.
- Marwa Taufik, Syirod Saleh, Analisis Potensi Relatif Sektor-sektor Ekonomi Sumatera Selatan, *Jurnal Kajian Ekonomi Vol I No 1*, Program Pasca Sarjana, 2002.
- Nachrowi, Djalal, *Penggunaan Teknik Ekonometrik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Pemerintah Daerah Kota Palembang, *Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2003 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002*.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BP. Panca Usaha Jakarta. 2001.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Santoso, Singgih, *SPSS Versi 10*, Gramedia, Jakarta, 2003
- Sondang, Siagian, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, PT. Gunung agung, Jakarta, 1984.
- Sriwijaya Post, 2004. *Ampora Ditaburi Cahaya Lampu*, 22 Mei 2004.
- Supranto, J, *Ekonometrika I*, LPFE -UI, Jakarta, 1984.
- Supriyono, Bambang, *Hubungan pusat dan daerah*, artikel, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. 2004.